



**DINAMIKA LEGISLATIF DALAM PENGAJUAN USULAN HAK  
INTERPELASI DPRD TERHADAP GUBERNUR DKI JAKARTA  
TERKAIT FORMULA E**

Tugas Akhir Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

Nama : Ika Diah Nawangsari

NIM : 1810413086



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA**

**DINAMIKA LEGISLATIF DALAM PENGAJUAN USULAN HAK  
INTERPELASI DPRD TERHADAP GUBERNUR DKI JAKARTA  
TERKAIT FORMULA E**



**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN  
SIDANG SKRIPSI PADA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**2023**

**DINAMIKA LEGISLATIF DALAM PENGAJUAN USULAN HAK INTERPELASI  
DPRD TERHADAP GUBERNUR DKI JAKARTA TERKAIT FORMULA E**

***THE LEGISLATIVE DYNAMICS IN SUBMITTING INTERPELLATION RIGHTS  
SHCEME OF PROVINCIAL LEGISLATIVES COUNCIL AGAINST THE GOVERNOR OF  
DKI JAKARTA RELATED FORMULA E***

Oleh:  
**Ika Diah Nawangsari**  
**1810413086**

**SKRIPSI**  
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada  
tanggal seperti tertera di bawah ini

Jakarta, Januari 2023

Pembimbing Utama

  
Afrimadona MA., Ph.D

Pembimbing Pendamping

  
Anwar Ilmar S.Sos., M.Si



## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Ika Diah Nawangsari

NIM : 1810413086

Program Studi : Ilmu Politik

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2023

Yang menyatakan,



Ika Diah Nawangsari

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Diah Nawangsari  
NIM : 1810413086  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **DINAMIKA LEGISLATIF DALAM PENGAJUAN USULAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP GUBERNUR DKI JAKARTA TERKAIT FORMULA E**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2023

Yang menyatakan,



Ika Diah Nawangsari

## **LEMBAR PENGESAHAN**

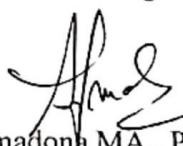
## **LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Ika Diah Nawangsari  
NIM : 1810413086  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Dinamika Legislatif dalam Pengajuan Usulan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Gubernur DKI Jakarta Terkait Formula E

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

### **Pembimbing I**



(Afrimadona MA., Ph.D)

### **Pengaji I**



(Dr. Asep Kamaluddin N. S.Ag., M.Si)

### **Pengaji II**



(Anwar Hmar S.Sos., M.IP)

### **KETUA PROGRAM STUDI**



(Restu Rahmawati, S.Sos.,MA.)

# **DINAMIKA LEGISLATIF DALAM PENGAJUAN USULAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP GUBERNUR DKI JAKARTA TERKAIT FORMULA E**

**IKA DIAH NAWANGSARI**

## **ABSTRAK**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif di tingkat lokal yang memiliki seperangkat hak dalam pelaksanaan fungsiannya. Salah satu seperangkat hak tersebut adalah hak interpelasi yang merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan atau penjelasan lebih lanjut kepada kepala daerah mengenai kebijakan penting dan berdampak luas. Usul Hak Interpelasi pernah digulirkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta oleh 2 (dua) Fraksi DPRD Provinsi terhadap Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 yaitu terkait program Formula E. Penelitian ini berfokus pada proses usul hak interpelasi Formula E yang diajukan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendapat penjelasan lebih lanjut dari Gubernur. Terdapat perbedaan posisi dan pandangan fraksi terkait urgensi usul hak interpelasi Formula E sehingga menimbulkan dinamika di internal DPRD. Penelitian ini menggunakan teori pembentukan koalisi serta teori *bargaining politic* menurut Gideon Doron dan Itai Sened.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yaitu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019-2024 dari 5 Fraksi. Penelitian ini menggunakan empat tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi fragmentasi posisi fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019-2024 dalam pengajuan usul hak interpelasi terkait Formula E. Fragmentasi tersebut terbagi menjadi Fraksi Pengusul Interpelasi dan Fraksi Non Pengusul Interpelasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat kuorum agenda Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Usul hak Interpelasi.

**Kata Kunci:** DPRD, Fraksi, Formula E, Hak Interpelasi, Rapat Paripurna

**THE LEGISLATIVE DYNAMICS IN SUBMITTING INTERPELLATION  
RIGHTS SCHEME OF PROVINCIAL LEGISLATIVE COUNCIL  
AGAINST THE GOVERNOR OF DKI JAKARTA RELATED FORMULA  
E**

**IKA DIAH NAWANGSARI**

**ABSTRACT**

*The Regional People's Representative Council is a legislative institution at the local level that has a set of rights in carrying out its functions. One of these rights is the right of interpellation, which is the right of the DPRD to request further information or explanations from the regional head regarding important and broad-based policies. The Proposal for the Right of Interpellation was rolled out in the administration of the regional government of DKI Jakarta Province by 2 (two) Factions of the Provincial Legislatives Council against the Governor of DKI Jakarta 2017-2022, related to the Formula E. This research focuses on the process of the proposed Formula E right of interpellation submitted by the PSI and PDI Perjuangan fractions of the Provincial Legislative Council to receive a further explanation from the Governor. There are differences in the positions and views of the factions regarding the urgency of the proposed Formula E right of interpellation, giving rise to internal dynamics within the DPRD. This study uses the theory of coalition formation and bargaining politics theory according to Gideon Doron and Itai Sened.*

*The method used in this research was descriptive qualitative by collecting primary and secondary data. The data collection technique was carried out through in-depth interviews with informants, namely members of the DKI Jakarta Provincial Legislative Council Period 2019-2024 from 5 factions. This study utilized four stages of data analysis according to Miles and Huberman, such as data collection, data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study discovered a fragmentation upon the positions of the 2019-2024 DKI Jakarta Provincial Legislative Council factions in submitting proposals for interpellation rights related to Formula E. The fragmentation was divided into Interpellation Proposers and Non-Interpellation Proposers Factions which resulted in quorum nonconformity on the "Decision-Making Plenary Meeting on the Proposed Right of Interpellation".*

**Keywords:** DPRD, Faction, Formula E, Plenary Meeting, Right of Interpellation

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini menjadi bukti perjuangan saya sebagai mahasiswa dan juga anak pertama yang berupaya menuntaskan program sarjana Ilmu Politik.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. Untuk Alm.Bapak yang berharap anak perempuannya bisa berpendidikan tinggi. Mama yang selalu menanyakan kapan sidang namun juga menjadi sumber semangat dan pengingat dalam hidup saya. Adik yang selalu bersedia saat saya membutuhkan bantuan. Beribu terima kasih saya ucapkan kepada Pak Afrimadona selaku Dosen Pembimbing I dan Pak Anwar selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan masukan dalam penelitian skripsi ini. Salam hormat dan terima kasih kepada seluruh narasumber yaitu Pak William, Pak Gilbert, Pak Hasan Basri, Pak MTZ dan Pak Purwanto dari DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berkenan meluangkan waktunya.

Tak lupa terima kasih saya sampaikan kepada Mas Razi Sabardi yang memberikan kesempatan agar saya dapat mengejar sidang di awal 2023. Kepada Mas Atma, Srimul, Salsabila, Agung dan Aini, terima kasih selalu ada menemani perjalanan dan memberikan dukungan moral saat saya hampir menyerah.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2023

Ika Diah Nawangsari

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS .....	3
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	4
LEMBAR PENGESAHAN .....	5
ABSTRAK .....	6
<i>ABSTRACT</i> .....	7
KATA PENGANTAR .....	8
DAFTAR ISI .....	9
DAFTAR GAMBAR .....	11
DAFTAR TABEL .....	11
BAB I .....	12
PENDAHULUAN .....	12
I.1 Latar Belakang .....	12
I.2 Rumusan Masalah .....	23
I.3 Tujuan Penelitian .....	24
I.4 Manfaat Penelitian .....	24
I.5 Sistematika Penulisan .....	25
BAB II .....	27
TINJAUAN PUSTAKA .....	27
II.1 Teori dan Konsep .....	27
II.1.1 Perilaku Politik Partai ( <i>Political Party Behaviour</i> ) .....	27
II.1.2 Tawar Menawar Politik ( <i>Political Bargaining</i> ) .....	30
II.2 Kerangka Berpikir .....	34
BAB III .....	35
METODE PENELITIAN .....	35
III.1 Obyek Penelitian .....	35
III.2 Jenis Penelitian .....	35
III.3 Teknik Pengumpulan Data .....	36
III.4 Sumber Data .....	37

III.5 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV .....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
IV.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024	
41	
IV.2 Program Formula E.....	53
IV.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	56
IV.3.1 Pandangan Umum dan Fragmentasi Posisi Fraksi mengenai Program	
Formula E dan Usul Hak Interpelasi .....	56
IV.3.2 Tawar Menawar Politik dalam Pengajuan Usul Hak Interpelasi Formula	
E oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024.....	89
IV.3.3 Pola Bargaining dalam Proses Pengajuan Usul Hak Interpelasi .....	102
IV.3.4 Outcome Politik Yang Ditimbulkan Dari Fragmentasi Posisi Fraksi-	
Fraksi .....	104
BAB V.....	105
KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
V.1 Kesimpulan .....	105
V.2 Saran.....	108
V.2. 1 Saran Praktis .....	108
V.2.2 Saran Teoritis.....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN .....	113

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Dokumen Usulan Hak Interpelasi .....	15
Gambar 2 Undangan Rapat Internal agenda Rapat Koordinasi Interpelasi Formula E .....	16
Gambar 3. Kerangka Berpikir .....	35

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Rencana Waktu Penelitian .....	41
Tabel 2 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Legislatif 2019 .....	44
Tabel 3 Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2019 .....	46
Tabel 4 Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024 .....	48
Tabel 5 Dampak Luas dan Tidak Langsung Penyelenggaraan Formula E .....	60
Tabel 6. Fraksi dalam Penelitian .....	61